

ANALISIS KEEFEKTIVITAS BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

Widiya luvita sari

2216041139

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Data dari Worldometers menunjukkan bahwa pada tanggal 14 Desember 2020, Indonesia memiliki populasi sebanyak 274,86 juta orang. Dengan jumlah ini, Indonesia berada di peringkat keempat dalam daftar negara-negara dengan jumlah penduduk terbesar di seluruh dunia. Dengan jumlah penduduk yang tidak sedikit tentunya Indonesia mengalami bermacam macam masalah salah satunya masalah sosial yaitu kemiskinan.

Sabinus Beni (2017) Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan kenyataan yang ada. Manusia dilahirkan ke dunia adalah untuk bahagia, sejahtera, makmur dan sukses.

Kemiskinan dapat diidentifikasi melalui beberapa faktor, seperti tingkat kualitas hidup yang rendah bagi penduduk, tingkat pendidikan dan kesehatan yang kurang memadai, masalah gizi pada anak-anak, serta keterbatasan akses terhadap sumber air minum yang layak. Dampak dari faktor-faktor ini dapat mengancam masa depan generasi muda, Simanjuntak (2010).

Kelompok penduduk miskin yang ada di masyarakat pedesaan dan perkotaan biasanya memiliki pekerjaan sebagai buruh tani, petani kecil, pedagang kecil, nelayan, pengrajin kecil, buruh, pedagang kaki lima, pedagang asongan, pemulung, gelandangan dan pengemis (gepeng), serta pengangguran. Keberadaan kelompok miskin ini dapat

menyebabkan masalah yang berlanjut terkait dengan kemiskinan kultural dan struktural, terutama jika tidak diatasi dengan serius, terutama untuk generasi berikutnya.

Umumnya, penduduk yang termasuk dalam kelompok miskin ini merupakan “golongan residual” yang berarti bahwa mereka belum mendapatkan manfaat dari berbagai kebijakan pemerintah yang secara khusus ditujukan kepada mereka, seperti Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), namun secara umum mereka mungkin telah berpartisipasi dalam Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bimbingan Masyarakat (Bimas), Program Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan, Program Keluarga Berencana (KB), Koperasi Unit Desa (KUD), PKK di desa, dan lain sebagainya. Kelompok ini sulit untuk mendapatkan perhatian karena kualitas sumber daya yang rendah sehingga mereka kurang mampu memanfaatkan berbagai fasilitas, termasuk faktor-faktor produksi.

Masalah kemiskinan saat ini telah menjadi isu yang berkepanjangan di Indonesia banyak sekali dampak yang terjadi akibat kemiskinan yaitu bidang pendidikan banyak anak-anak dari keluarga miskin terpaksa menghadapi tantangan dalam mengakses pendidikan berkualitas. Mereka mungkin terhalang oleh biaya pendidikan, kurangnya akses ke sarana pendidikan, atau bahkan harus bekerja untuk membantu keluarga mereka, yang menghambat perkembangan pendidikan mereka.

Pada kesehatan akibat rendahnya ekonomi keluarga miskin di Indonesia tidak dapat membayar perawatan medis yang diperlukan, dan ini dapat mengakibatkan penyakit yang tidak terkontrol dan memburuk kesehatan yang buruk juga dapat berdampak pada produktivitas seseorang. Akibat dari kemiskinan ini tingkat kualitas hidup masyarakat jauh dari kata layak mereka mungkin menghadapi kesulitan dalam kebutuhan pangan, papan dan papan.

Adapun faktor-faktor yang mendorong masalah kemiskinan di Indonesia sangat beragam dan kompleks. Pertama, laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat menjadi salah satu kontributor utama dengan populasi yang besar, persaingan untuk lapangan kerja dan akses sumber daya ekonomi menjadi lebih ketat. Selain itu, banyaknya penduduk usia produktif yang tidak bekerja juga menjadi permasalahan serius, mengakibatkan potensi ekonomi yang belum dimanfaatkan secara optimal. Kebijakan pemerintah yang tidak selalu tepat sasaran juga turut berkontribusi dalam masalah ini, di mana diperlukan pembenahan dalam pengelolaan dan distribusi bantuan sosial.

Serta tidak ada kesetaraan distribusi pendapatan antara daerah-daerah di Indonesia menjadi kendala serius, dengan beberapa wilayah yang jauh lebih makmur daripada yang lain. Semua faktor ini bersama-sama menciptakan tantangan yang kompleks dalam upaya mengatasi kemiskinan di negara ini.

Berdasarkan rumusan UUD 1945 alinea ke-4, yaitu memajukan kesejahteraan umum merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia, salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi warga negaranya adalah dengan memangkas warganya yang berada dalam kemiskinan. Upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan diimplementasikan melalui berbagai program mulai dari yang sifatnya bantuan sosial, pemberdayaan sampai kepada pemberian kredit usaha pada target yang memenuhi persyaratan di mana salah satu program bantuan sosial yang dipadukan dengan pengembangan sumber daya manusia adalah Program Keluarga Harapan, Evi Fitriah (2010).

Pengaruh dari banyaknya faktor dan dampak kemiskinan di Indonesia pihak pemerintahan membuat salah satu program pada tahun 2007 yang disinyalir mampu mengurangi angka kemiskinan serta menjadi upaya pemberdayaan masyarakat miskin atau kurang mampu yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH (<https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh>, 2023), Program Perlindungan Sosial, yang juga dikenal dengan sebutan Conditional Cash Transfers (CCT) di tingkat internasional, telah terbukti berhasil dalam mengatasi masalah kemiskinan kronis di negara-negara tersebut.

Sebagai program bantuan sosial dengan syarat, Program Keluarga Harapan (PKH) membuka akses bagi keluarga miskin, terutama ibu hamil dan anak-anak, untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga diperluas untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan menjaga taraf kesejahteraan sosial mereka sesuai dengan amanat konstitusi.

Melalui PKH, keluarga miskin didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan layanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, pangan, gizi, perawatan, dan pendampingan. Ini juga mencakup akses ke berbagai program perlindungan sosial lain yang merupakan program yang melengkapi secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi pusat dan pusat keunggulan dalam upaya mengatasi kemiskinan yang menggabungkan berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan sosial nasional.

Pada tingkat jangka pendek, bantuan ini memberikan bantuan langsung dalam mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), yang dapat membantu mereka mengatasi kebutuhan sehari-hari dengan lebih baik. Namun, pada tingkat jangka panjang, bantuan ini juga memiliki persyaratan yang mendorong keluarga penerima untuk mengambil langkah-langkah penting dalam meningkatkan kondisi kesehatan dan pendidikan anak-anak mereka.

Ini melibatkan pendidikan anak, imunisasi balita, perawatan prenatal bagi ibu hamil, dan peningkatan gizi. Dengan melakukan langkah-langkah ini, diharapkan bahwa bantuan ini akan memiliki dampak jangka panjang dalam memutuskan siklus kemiskinan antar generasi, dengan memberikan anak-anak kesempatan yang lebih baik untuk mengatasi kemiskinan di masa depan.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, tertulis dalam pasal 5 kriteria komponen-komponen yang menjadi syarat bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).

Kriteria untuk komponen kesehatan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 3, mencakup:

- a. Perempuan yang sedang hamil atau sedang menyusui; dan
- b. Anak-anak yang berusia antara 0 (nol) hingga 6 (enam) tahun.

Kriteria untuk komponen pendidikan, seperti yang disebutkan dalam Pasal 3, mencakup:

- a. Anak-anak yang sedang bersekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau tingkat yang setara;
- b. Anak-anak yang sedang bersekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau tingkat yang setara;
- c. Anak-anak yang sedang bersekolah menengah atas/madrasah aliyah atau tingkat yang setara; dan

d. Anak-anak yang berusia antara 6 (enam) hingga 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar selama 12 (dua belas) tahun.

Kriteria untuk komponen kesejahteraan sosial, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 3, mencakup:

- a. Orang yang sudah lanjut usia, yaitu mereka yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih; dan
- b. Penyandang disabilitas, dengan prioritas diberikan kepada mereka yang mengalami disabilitas berat.

Dalam Pasal 6, dijelaskan bahwa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH berhak memperoleh:

- a. Bantuan Sosial dari PKH;
- b. Pendampingan yang disediakan oleh PKH;
- c. Layanan yang diberikan di fasilitas-fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau sosial kesejahteraan; dan
- d. Program Bantuan Komplementer di berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, energi subsidi, ekonomi, perumahan, serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Kota Bandar Lampung, sebagai salah satu kota yang berada di Pulau Sumatera, juga tidak luput dari dampak kemiskinan yang melanda masyarakatnya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung untuk tahun 2022, tercatat sekitar 91 ribu jiwa masyarakat miskin atau kurang mampu di kota ini. Meskipun terjadi penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2021, ketika jumlah masyarakat kurang mampu mencapai 99 ribu jiwa, angka tersebut tetap menjadi permasalahan serius.

Ekardo (2014) dalam studi berjudul “Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Mengatasi Kemiskinan di Nagari Lagan Hilir, Kabupaten Pesisir Selatan”, menyimpulkan bahwa tujuan Program Keluarga Harapan di Nagari Lagan Hilir Punggasan sudah berhasil tercapai, terutama jika melihat dari aspek pendidikan dan kesehatan. Dalam hal pendidikan, minat anak-anak Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) untuk bersekolah telah meningkat karena mereka sekarang memiliki pakaian dan perlengkapan sekolah yang memadai, yang berbeda dengan situasi sebelum mereka menjadi peserta PKH. Di bidang kesehatan, ibu rumah tangga miskin kini lebih sering membawa anak-anak mereka untuk mendapatkan

perawatan di Puskesmas, dan anak-anak tidak lagi mengalami masalah kekurangan gizi. Temuan ini didasarkan pada data primer yang dikumpulkan oleh peneliti dari petugas Puskesmas

Ananda Dwi Arum (2022) dalam studinya yang berjudul “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Mengurangi Beban Pengeluaran Keluarga Miskin di Nagori Kandangan Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun”, berkaitan dengan efektivitas PKH di Nagori Kandangan, penulis mempunyai hasil dari beberapa masalah, termasuk keterlambatan dalam penyaluran dana PKH. Dalam proses penyaluran dana kepada masyarakat, seringkali terjadi keterlambatan yang signifikan, bahkan beberapa keluarga penerima manfaat (KPM) tidak menerima dana tersebut sama sekali. Selain itu, jangka waktu antara penyaluran bantuan yang terlalu lama, yaitu tiga bulan sekali, dan jumlah bantuan yang diberikan tidak memadai atau tidak seimbang dengan kebutuhan dalam kata lain, dana yang diberikan tidak mencukupi untuk mendukung biaya pendidikan anak-anak KPM, dan jika biaya pendidikan anak-anak meningkat, maka bantuan PKH yang diberikan dalam periode tiga bulan tersebut tidak mencukupi dan tidak sejalan. Selain itu, masalah terkait dengan ketidakakuratan dalam pendataan KPM juga terjadi, di mana beberapa individu yang mungkin mampu secara finansial menjadi KPM, sementara beberapa individu miskin tidak diakui sebagai KPM.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi pendorong kemiskinan di Kota Bandar Lampung:

1. Pertumbuhan Penduduk yang Cepat

Salah satu faktor utama yang berkontribusi pada masalah kemiskinan di Kota Bandar Lampung adalah pertumbuhan penduduk yang cepat. Populasi yang terus bertambah dapat menciptakan tekanan besar pada lapangan pekerjaan dan sumber daya ekonomi. Dengan penduduk yang terus berkembang, persaingan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan penghidupan yang stabil semakin meningkat.

2. Pengangguran dan Tidak partisipan dalam Angkatan Kerja

Tingginya angka pengangguran atau tidak partisipan dalam angkatan kerja, khususnya di kalangan kelompok usia produktif, juga merupakan faktor yang memperburuk masalah kemiskinan di Kota Bandar Lampung. Banyak warga yang berada dalam usia yang potensial untuk bekerja namun tidak dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan

keterampilan mereka. Hal ini berdampak negatif pada perekonomian mereka dan meningkatkan tingkat kemiskinan di kota ini

3. Kebijakan Pemerintah yang Tidak Tepat Sasaran

Tidak tepatnya sasaran kebijakan pemerintah dapat menjadi penyebab kemiskinan yang signifikan. Jika bantuan sosial dan program ekonomi tidak dirancang dengan baik atau tidak mencapai kelompok yang benar-benar membutuhkannya, maka masyarakat yang rentan akan terus mengalami kesulitan.

4. Tidak Setaranya Distribusi Pendapatan

Tidak setaranya dalam distribusi pendapatan antar wilayah di Kota Bandar Lampung juga merupakan isu yang perlu diatasi beberapa wilayah mungkin jauh lebih makmur daripada yang lain, dan hal ini dapat menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi yang signifikan. Kesenjangan ini memengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi.

Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Bandar Lampung telah menjadi salah satu upaya yang signifikan dalam mengatasi permasalahan kemiskinan. Melalui bantuan keuangan langsung, insentif pendidikan, akses layanan kesehatan, dan pendampingan, PKH berupaya memberikan dukungan holistik kepada keluarga miskin dan rentan di kota ini.

Selain itu, program ini tidak hanya memberikan bantuan finansial sekali, tetapi juga berfokus pada pemantauan dan evaluasi jangka panjang untuk memastikan bahwa keluarga penerima manfaat dapat mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik secara berkelanjutan. Integrasi PKH dengan program bantuan sosial lainnya juga menunjukkan pendekatan yang komprehensif dalam penanggulangan kemiskinan meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi, upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat, menjadikan PKH sebagai instrumen penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang kurang mampu di Kota Bandar Lampung.

Bantuan keuangan langsung yang diberikan oleh PKH memiliki dampak yang signifikan dalam meringankan beban ekonomi keluarga miskin di Bandar Lampung dana yang diterima dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sebagian besar keluarga penerima manfaat PKH menghadapi ketidakpastian ekonomi yang tinggi, dan bantuan ini

memberikan keamanan finansial yang sangat dibutuhkan dengan mengurangi tekanan ekonomi, PKH memungkinkan keluarga untuk fokus pada upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Selain bantuan keuangan, PKH memberikan insentif pendidikan yang memiliki implikasi besar dalam menciptakan perubahan sosial. Hal ini memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sekadar pengurangan kemiskinan saat ini dengan memastikan pendidikan anak-anak, PKH berinvestasi dalam masa depan generasi muda Bandar Lampung. Pendidikan adalah kunci untuk mengakhiri siklus kemiskinan, dan PKH membuka pintu bagi anak-anak ini untuk memiliki peluang yang lebih baik dalam hidup.

PKH juga membuka akses yang lebih besar ke layanan kesehatan yang berkualitas, pendampingan adalah aspek penting dari PKH program ini tidak hanya memberikan bantuan finansial dan mengharapka keluarga untuk mengelolanya sendiri. Sebaliknya, pendampingan disediakan untuk membantu keluarga dalam merencanakan pengeluaran dan memastikan bahwa dana PKH digunakan dengan bijaksana pendamping ini tidak hanya berperan sebagai penasihat keuangan, tetapi juga sebagai sumber daya yang membantu keluarga untuk memahami bagaimana mereka dapat mencapai kemandirian ekonomi. Pendampingan seperti ini sangat berharga, karena membantu melengkapi keluarga dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola sumber daya dengan bijak.

Selain komponen utama ini, PKH juga mengintegrasikan dirinya dengan berbagai program bantuan sosial lainnya yang ada di Bandar Lampung hal ini merupakan langkah cerdas, karena membantu menciptakan pendekatan yang lebih menyeluruh dalam mengatasi masalah kemiskinan. Banyak keluarga miskin menghadapi berbagai tantangan yang melampaui sekadar ekonomi, seperti tidak adanya kesetaraan dalam akses ke pendidikan dan layanan kesehatan.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Bandar Lampung harus adanya efektivitas pelaksanaan program dan pemantauan yang lebih ketat, sebagai bagian dari upaya bersama dalam mengatasi kemiskinan, peran masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta sangat penting. Penanggulangan kemiskinan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab semua pemangku kepentingan dalam masyarakat. Masyarakat sipil dapat berperan dalam pemantauan dan advokasi, sementara sektor swasta

dapat berkontribusi dengan menciptakan peluang kerja dan investasi yang dapat membantu meningkatkan perekonomian kota.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana keefektivitasan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meminimalisir angka kemiskinan di Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana sikap dan pandangan masyarakat terhadap pengimplementasian Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Bandar Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengukur serta menganalisis tentang keefektifan PKH dalam mengurangi kemiskinan dan bagaimana masyarakat menanggapi program ini di Kota Bandar Lampung.

D. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk membuat kebijakan yang lebih baik dalam rangka meningkatkan efektivitas PKH dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak program ini.
2. Penelitian akan membantu dalam memahami sikap dan pandangan masyarakat terhadap PKH sejauh mana program ini diterima oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Besar, G., Publik, K., Ekonomi, F., Bisnis, D., & Abstrak, U. (n.d.). *KEMISKINAN DAN KONSEP TEORITISNYA Oleh : Yulianto Kadji.*

Ekardo, A., Firdaus, F., & Elfemi, N. (2014). Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam upaya Pengentasan Kemiskinan di Nagari Lagan Hilir, Kab. Pesisir Selatan. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 3(1), 1-9.

Hasmini Andi Rasyid Pananrangi Syamsuddin Maldun. (n.d.).

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN(PKH) DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KECAMATAN PADARINCANG KABUPATEN SERANG. (n.d.).

Kemiskinan Perbatasan, P. di, Studi Kewirausahaan, P., Tinggi Ilmu Manajemen Shanti Buana Jln Bukit Karmel No, S., & Barat, K. (n.d.). *EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM* Sabinus Beni dan Blasius Manggu (Vol. 9, Issue 02).

Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. In *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi & Sosial* (Vol. 9, Issue 2).
PERMENSOS NOMOR 1 TAHUN 2018. (n.d.).